

Resistensi Mahasiswa terhadap Kebijakan Institusi: Tinjauan Literatur tentang Kunci Penerimaan

Rheina Ferina¹ & Aditia Fradito²¹Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Lampung, Indonesia²Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Lampung, Indonesia¹Email: rheinafrn.hynjnlv@gmail.com, ²Email: aditiafradito@radenintan.ac.id

Abstrak: This study aims to review various scholarly works discussing student resistance to institutional policies in higher education, focusing on identifying the key factors influencing the acceptance or rejection of such policies. The research employs a literature review method by analyzing thirty-two relevant academic sources, including national and international journals as well as scholarly books published within the last decade. Data were analyzed descriptively and qualitatively through thematic identification, synthesis of findings, and conceptual interpretation based on the theories of organizational change and planned behavior. The results reveal that student resistance commonly arises from the lack of transparent communication, limited student participation in decision-making processes, and weak transformational leadership at the institutional level. Conversely, policy acceptance is driven by three major factors: participatory communication, visionary leadership, and procedural justice that fosters student trust in the institution. These findings emphasize the importance of a trust-based policy approach in higher education management to strengthen policy legitimacy and minimize student resistance sustainably.

Kata kunci: student resistance, institutional policy, participation, transformational leadership, literature review.

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk meninjau berbagai literatur ilmiah yang membahas resistensi mahasiswa terhadap kebijakan institusi pendidikan tinggi, dengan fokus menemukan faktor-faktor kunci yang memengaruhi penerimaan atau penolakan terhadap kebijakan tersebut. Kajian ini menggunakan metode literature review dengan menganalisis tiga puluh dua sumber ilmiah yang relevan, terdiri atas jurnal nasional, internasional, dan buku akademik dalam sepuluh tahun terakhir. Data dianalisis secara deskriptif-kualitatif melalui proses identifikasi tema, sintesis temuan, dan interpretasi konseptual berdasarkan teori perubahan organisasi dan perilaku terencana. Hasil kajian menunjukkan bahwa resistensi mahasiswa umumnya muncul akibat kurangnya komunikasi kebijakan yang transparan, rendahnya partisipasi mahasiswa dalam proses pengambilan keputusan, serta lemahnya kepemimpinan transformasional di tingkat institusi. Adapun kunci penerimaan kebijakan terletak pada tiga faktor utama, yaitu komunikasi partisipatif, kepemimpinan visioner, dan keadilan prosedural yang membangun kepercayaan mahasiswa terhadap institusi. Temuan ini menegaskan pentingnya pendekatan *trust-based policy* dalam manajemen pendidikan tinggi untuk memperkuat legitimasi kebijakan dan meminimalkan resistensi mahasiswa secara berkelanjutan.

Kata kunci: resistensi mahasiswa, kebijakan institusi, partisipasi, kepemimpinan transformasional, literature review

Article historyReceived:
10 November 2025Accepted:
18 December 2025Published:
31 December 2025

© 2025 The Author(s).
Jurnal Ilmu Manajemen dan
Pendidikan by Universitas
Mulawarman

How to cite this article:

Ferina, R., & Fradito, A. (2025). Resistensi Mahasiswa terhadap Kebijakan Institusi: Tinjauan Literatur tentang Kunci Penerimaan. *Jurnal Ilmu Manajemen dan Pendidikan*, 5(2), 215–220. <https://doi.org/10.30872/impian.v5i2.5914>

Corresponding author: Rheina Ferina, Email: rheinafrn.hynjnlv@gmail.com



Jurnal Ilmu Manajemen dan Pendidikan is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

PENDAHULUAN

Perubahan kebijakan di lingkungan perguruan tinggi merupakan keniscayaan dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan dan menyesuaikan diri dengan dinamika sosial, ekonomi, serta teknologi. Namun, berbagai penelitian menunjukkan bahwa setiap perubahan kebijakan sering kali memicu resistensi mahasiswa, baik dalam bentuk penolakan terbuka maupun sikap pasif terhadap implementasi kebijakan (Fithriyatirrizqoh, 2024). Resistensi ini muncul karena mahasiswa merupakan bagian dari komunitas akademik yang memiliki persepsi, nilai, dan kepentingan terhadap kebijakan institusi. Oleh karena itu, mahasiswa memiliki hak untuk memberikan tanggapan terhadap setiap perubahan yang menyangkut aktivitas akademik dan kehidupan kampus (Wigati et al., 2023).

Dalam konteks pendidikan tinggi di Indonesia, resistensi mahasiswa terhadap kebijakan institusi sering kali berakar pada ketidakselarasan antara kebijakan dengan kebutuhan mahasiswa, kurangnya transparansi, serta minimnya partisipasi mahasiswa dalam proses formulasi kebijakan (Darmawan, 2024; Kebubun & Fonataba, 2024). Fenomena seperti kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT), penerapan sistem pembelajaran daring, atau kebijakan program Kampus Merdeka menunjukkan bahwa resistensi tidak selalu disebabkan oleh penolakan terhadap substansi kebijakan, melainkan akibat proses komunikasi kebijakan yang tidak partisipatif (Nugraha, 2021; Subkhan, 2022).

Penelitian internasional menunjukkan pola yang serupa. Głowczewski et al. (2022) menemukan bahwa persepsi keadilan prosedural dan komunikasi terbuka menjadi faktor kunci dalam membangun legitimasi institusi pendidikan tinggi. Ketika mahasiswa merasa dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan dan memperoleh informasi yang transparan, tingkat penerimaan terhadap kebijakan meningkat secara signifikan (Li & Xue, 2023; Yang, 2021). Sebaliknya, kebijakan yang bersifat *top-down* dan tidak disertai komunikasi efektif cenderung memunculkan resistensi, bahkan dalam konteks budaya akademik yang berbeda (Bergdahl et al., 2024).

Beberapa kajian nasional memperkuat temuan tersebut. Fithriyatirrizqoh (2024) menunjukkan bahwa gerakan mahasiswa terhadap kebijakan kampus sering kali dipicu oleh persepsi ketidakadilan dalam kebijakan finansial dan administrasi. Sementara itu, Siduppa (2023) menegaskan bahwa resistensi mahasiswa juga berfungsi sebagai bentuk kontrol sosial terhadap kebijakan institusi yang dianggap tidak aspiratif. Penelitian Wigati et al. (2023) mengenai resistensi terhadap kebijakan pembelajaran daring menunjukkan bahwa tingkat penerimaan kebijakan meningkat ketika komunikasi antara mahasiswa dan pihak kampus bersifat dua arah dan kolaboratif.

Secara teoretis, fenomena resistensi terhadap kebijakan institusi dapat dijelaskan melalui Teori Perubahan Organisasi (Kotter, 2012) dan *Theory of Planned Behavior* (Ajzen, 1991). Menurut Kotter (2012), perubahan yang tidak disertai dengan rasa urgensi dan partisipasi kolektif akan menimbulkan resistensi organisasi. Di sisi lain, Ajzen (1991) menegaskan bahwa niat untuk menerima atau menolak kebijakan dipengaruhi oleh sikap individu, norma subjektif, serta persepsi kontrol perilaku. Dalam konteks pendidikan tinggi, ketiga aspek tersebut tercermin pada cara mahasiswa menilai kebijakan institusi yang berdampak langsung terhadap aktivitas akademik mereka.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa resistensi mahasiswa terhadap kebijakan institusi bukan semata-mata bentuk penolakan terhadap perubahan, melainkan refleksi dari kurangnya integrasi antara kebijakan, komunikasi, dan partisipasi mahasiswa. Hingga kini, kajian mengenai strategi untuk menemukan kunci penerimaan kebijakan yang mampu meminimalkan resistensi mahasiswa masih terbatas, terutama dalam konteks Indonesia. Oleh karena itu, artikel ini bertujuan untuk meninjau literatur ilmiah yang relevan guna mengidentifikasi faktor-faktor penentu penerimaan mahasiswa terhadap kebijakan institusi pendidikan tinggi.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan tinjauan literatur (*literature review*) untuk menelaah hasil-hasil penelitian terdahulu mengenai fenomena resistensi mahasiswa terhadap kebijakan institusi pendidikan tinggi. Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian terletak pada pemahaman konseptual, sehingga analisis dilakukan terhadap literatur akademik yang tersedia tanpa melakukan pengumpulan data lapangan. Jenis penelitian yang diterapkan adalah kualitatif deskriptif dengan metode tinjauan literatur sistematis (*systematic literature review*). Melalui metode ini, berbagai sumber ilmiah ditelusuri dan dianalisis

secara sistematis guna menemukan tema serta pola konseptual terkait faktor-faktor penerimaan mahasiswa terhadap kebijakan institusi. Proses peninjauan dilakukan secara transparan dan terstruktur untuk menjamin akuntabilitas ilmiah hasil kajian.

Sumber data berasal dari artikel ilmiah, buku, dan laporan penelitian yang diterbitkan dalam kurun waktu 2015–2025. Data diperoleh dari basis data akademik bereputasi, seperti *Google Scholar*, *DOAJ*, *Scopus*, dan *Garuda Dikt*, dengan menggunakan kata kunci: "resistensi mahasiswa," "penerimaan kebijakan," dan "komunikasi kebijakan". Pemilihan literatur didasarkan pada relevansi topik, kualitas publikasi, serta keterkaitannya dengan konteks pendidikan tinggi. Artikel yang bersifat opini atau diterbitkan sebelum tahun 2015 dikecualikan dari proses analisis.

Analisis data dilakukan melalui tahapan identifikasi, seleksi, dan sintesis. Setiap literatur yang terpilih ditelaah secara cermat untuk mengidentifikasi temuan utama yang berkaitan dengan penyebab resistensi maupun kunci penerimaan mahasiswa terhadap kebijakan institusi. Selanjutnya, dilakukan analisis tematik untuk mengelompokkan hasil penelitian ke dalam tema-tema utama, seperti komunikasi kebijakan, partisipasi mahasiswa, dan keadilan institusional. Melalui proses sintesis tersebut, disusun sebuah pemahaman konseptual mengenai hubungan antara komunikasi kebijakan, keterlibatan mahasiswa, dan tingkat penerimaan terhadap kebijakan institusi. Seluruh sumber yang digunakan telah melalui proses penelaahan sejawat (*peer review*) dan dinilai kredibel secara akademik. Validitas penelitian diperkuat dengan membandingkan hasil kajian dari konteks nasional dan internasional guna memperoleh gambaran komprehensif mengenai dinamika resistensi mahasiswa terhadap kebijakan institusi pendidikan tinggi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Fenomena resistensi mahasiswa terhadap kebijakan institusi pendidikan tinggi menunjukkan kompleksitas yang tidak dapat dijelaskan hanya melalui pendekatan tunggal. Analisis terhadap berbagai literatur mengungkapkan bahwa resistensi bukanlah sekadar bentuk penolakan, melainkan respons sosial terhadap kebijakan yang dianggap tidak mencerminkan kepentingan kolektif mahasiswa. Pratama (2021) menjelaskan bahwa mahasiswa sering kali memandang kebijakan institusi sebagai simbol kekuasaan birokratik yang tidak transparan dan minim komunikasi dua arah. Kondisi ini menciptakan jarak emosional antara mahasiswa dan pengambil kebijakan, terutama saat proses perumusan dilakukan secara *top-down*. Dalam konteks ini, resistensi bermanifestasi sebagai cerminan kebutuhan mahasiswa untuk diakui sebagai subjek aktif, bukan sekadar objek kebijakan.

Ditinjau dari dimensi psikologis, resistensi muncul akibat rasa ketersinggan (*alienation*) terhadap keputusan yang tidak melibatkan mahasiswa. Saat kebijakan dirasakan menekan kebebasan akademik atau mempersempit ruang ekspresi, mahasiswa cenderung membentuk sikap oposisi. Studi Nugroho (2020) menunjukkan bahwa persepsi mahasiswa terhadap keadilan prosedural dalam penyusunan kebijakan berpengaruh langsung terhadap tingkat penerimaan mereka. Mahasiswa cenderung lebih akomodatif terhadap kebijakan jika prosesnya dinilai adil dan argumentasinya disampaikan secara terbuka. Sebaliknya, kebijakan yang diputuskan sepihak memicu resistensi dalam bentuk protes, kritik terbuka, hingga apatisme akademik. Fenomena ini menegaskan bahwa resistensi bukan sekadar gejala perilaku, melainkan refleksi dari persepsi psikologis mengenai keadilan dan legitimasi.

Dalam konteks institusional, resistensi mahasiswa sering kali berakar pada lemahnya komunikasi kebijakan. Pengambilan keputusan yang mengeksklusi mahasiswa sejak tahap awal menimbulkan kesan bahwa kebijakan tersebut tidak merepresentasikan kepentingan konstituen. Mulyadi (2023) menunjukkan bahwa partisipasi mahasiswa dalam forum kebijakan kampus secara signifikan meningkatkan kepercayaan terhadap keputusan institusional. Pemberian kesempatan formal untuk memberikan masukan memungkinkan mahasiswa mengembangkan rasa memiliki (*sense of belonging*) terhadap kebijakan. Partisipasi tidak hanya memperkuat legitimasi kebijakan, tetapi juga memperkokoh hubungan antara mahasiswa dan pimpinan institusi, yang menjadi fondasi bagi budaya akademik partisipatif dan inklusif.

Faktor kepemimpinan juga memainkan peran sentral dalam menentukan derajat penerimaan kebijakan. Kepemimpinan instruktif dan otoriter cenderung memperkuat resistensi, sementara kepemimpinan transformatif justru menumbuhkan penerimaan. Hidayat (2023) menjelaskan bahwa pemimpin transformatif membangun hubungan berbasis empati, keteladanan, dan komunikasi terbuka. Pemimpin tipe ini tidak hanya menegakkan kebijakan secara administratif, tetapi juga menanamkan nilai kolaborasi dan

tanggung jawab bersama. Di perguruan tinggi keagamaan, gaya kepemimpinan yang meneladani nilai moral dan spiritual terbukti lebih efektif dalam menumbuhkan rasa hormat dan keterlibatan mahasiswa.

Temuan ini selaras dengan *Policy Acceptance Theory* yang menekankan pentingnya faktor kepercayaan (*trust*) dan legitimasi dalam penerimaan kebijakan. Kepercayaan dibangun melalui transparansi dan konsistensi antara pernyataan institusi dengan tindakannya. Rahmadani (2022) menemukan bahwa komunikasi berbasis dialog terbuka lebih efektif dalam meningkatkan penerimaan dibandingkan komunikasi satu arah melalui pengumuman formal. Legitimasi kebijakan tidak hanya diukur dari aspek hukum, tetapi juga dari sejauh mana kebijakan dianggap adil dan bermanfaat. Dengan demikian, keberhasilan kebijakan bergantung pada cara kebijakan tersebut disampaikan dan dikelola, bukan semata-mata pada desain teknisnya.

Perbandingan dengan studi internasional menunjukkan pola serupa antara konteks Indonesia dan global. Jones dan Carter (2021) menunjukkan bahwa resistensi di universitas Eropa dan Amerika berakar pada kurangnya *trust-based governance*. Meskipun terdapat kecenderungan universal untuk menolak kebijakan yang tidak transparan, perbedaannya terletak pada konteks budaya: di Barat, resistensi cenderung disalurkan melalui mekanisme hukum atau organisasi formal, sedangkan di Indonesia, resistensi lebih banyak dimediasi melalui media sosial dan solidaritas informal.

Sintesis literatur merumuskan kunci penerimaan kebijakan dalam tiga pilar utama yang bersifat interdependent, yaitu transparansi informasi, partisipasi aktif, dan kepemimpinan empatik, di mana kelemahan pada salah satu aspek tersebut akan meningkatkan potensi resistensi. Model ini diperkuat oleh manajemen perubahan Kotter (2012) yang menyatakan bahwa perubahan berkelanjutan menuntut keterlibatan aktif seluruh pemangku kepentingan, sehingga disusunlah sebuah model konseptual *trust-based policy environment* yang mengintegrasikan tiga faktor utama. Faktor pertama adalah komunikasi transparan dan partisipatif sebagai fondasi kepercayaan sosial yang mengurangi ketidakpastian serta kecurigaan (Rachmawati, 2022), di mana ruang dialog yang setara mampu meningkatkan persepsi legitimasi sekaligus menekan resistensi (Fithriyatirrizqoh, 2024) melalui partisipasi bermakna yang mengubah kepatuhan formal menjadi kesadaran kolektif (Anshori, 2023). Faktor kedua melibatkan kepemimpinan transformatif yang bertindak sebagai katalis dalam mengubah motivasi individu menuju tujuan kolektif (Bass & Riggio, 2006), mengingat empati pimpinan membuat mahasiswa merasa diakui secara moral sehingga menurunkan tingkat resistensi secara signifikan (Rahman, 2022). Faktor ketiga adalah keterlibatan strategis mahasiswa dalam tahap perencanaan hingga evaluasi yang menciptakan loyalitas serta sikap adaptif (Dewi & Nugroho, 2020), sekaligus mengubah resistensi menjadi umpan balik produktif bagi keberlanjutan kebijakan (Nguyen et al., 2022). Secara teoretis, ketiga faktor ini merepresentasikan integrasi dimensi kognitif, afektif, dan konatif yang menunjukkan bahwa resistensi bukanlah kegagalan kebijakan, melainkan indikator sistem partisipatif yang menuntut transparansi dan kolaborasi. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya perlu menguji validitas model *trust-based policy* ini secara empiris di berbagai konteks perguruan tinggi guna mengonfirmasi efektivitas jangka panjangnya.

PENUTUP

Kajian literatur ini menyimpulkan bahwa resistensi mahasiswa terhadap kebijakan institusi pendidikan tinggi merupakan fenomena kompleks dan multidimensional. Resistensi tidak semata-mata menunjukkan sikap penolakan, melainkan refleksi dari dinamika sosial, psikologis, dan kelembagaan di lingkungan kampus. Hasil telaah menegaskan bahwa kebijakan yang dirumuskan tanpa partisipasi aktif dan komunikasi terbuka berpotensi besar memicu resistensi. Sebaliknya, kebijakan yang disusun secara kolaboratif dengan melibatkan mahasiswa sejak tahap perencanaan hingga evaluasi cenderung lebih mudah diterima karena memiliki legitimasi moral dan institusional yang kuat.

Faktor determinan yang memengaruhi penerimaan mahasiswa mencakup transparansi informasi, partisipasi aktif, serta kepemimpinan empatik. Ketiga aspek ini merupakan fondasi utama bagi terbentuknya kepercayaan (*trust*) antara mahasiswa dan pihak institusi. Transparansi kebijakan membangun kejelasan dan rasa aman, partisipasi menciptakan rasa memiliki (*sense of belonging*), sedangkan kepemimpinan empatik memperkuat dimensi emosional dan moral dari kebijakan tersebut. Tanpa integrasi ketiga faktor ini, kebijakan institusi akan kehilangan legitimasi, yang pada gilirannya memicu resistensi dalam bentuk protes, ketidakpatuhan, hingga penurunan motivasi akademik.

Implikasi teoretis dari penelitian ini menekankan perlunya memperluas pemahaman mengenai konsep resistensi dalam ekosistem pendidikan tinggi. Resistensi bukan sekadar bentuk oposisi terhadap kekuasaan birokratis, melainkan bagian dari proses pembelajaran sosial di mana mahasiswa berperan sebagai agen perubahan. Dalam kerangka *Policy Acceptance Theory*, hasil kajian ini memperkaya literatur dengan menegaskan bahwa penerimaan kebijakan tidak dapat dipisahkan dari konteks budaya organisasi dan relasi kekuasaan di kampus. Oleh karena itu, manajemen perubahan di perguruan tinggi harus bergeser dari fokus pada hasil akhir (*output-oriented*) menuju penguatan proses komunikasi dan pelibatan aktor akademik. Sedangkan secara praktis, penelitian ini merekomendasikan institusi pendidikan tinggi untuk mengembangkan model komunikasi kebijakan yang bersifat dialogis dan kolaboratif. Sosialisasi kebijakan sebaiknya dilakukan melalui forum diskusi terbuka dan mekanisme penyerapan aspirasi guna menciptakan ruang partisipasi yang sehat. Kepemimpinan akademik perlu menginternalisasi nilai empati dan etika dengan menempatkan mahasiswa sebagai mitra strategis, bukan sekadar objek administratif.

Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menguji model konseptual yang dihasilkan dari kajian ini secara empiris, misalnya dengan mengukur korelasi antara tingkat partisipasi, gaya kepemimpinan, dan efektivitas penerimaan kebijakan di berbagai tipologi perguruan tinggi. Dengan demikian, hasil kajian ini tidak hanya memberikan kontribusi teoretis, tetapi juga menjadi landasan praktis bagi pengembangan kebijakan pendidikan yang lebih humanistik, inklusif, dan berkeadilan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Anshori, M. (2023). Dinamika resistensi mahasiswa terhadap kebijakan akademik: Analisis peran organisasi mahasiswa dalam konteks demokrasi kampus. *Jurnal Pendidikan dan Kebijakan*, 15(2), 101–115.
- Bass, B. M., & Riggio, R. E. (2006). *Transformational leadership* (2nd ed.). Lawrence Erlbaum Associates.
- Bergdahl, N., Nouri, J., & Fors, U. (2024). Student trust and digital policy in higher education: A Scandinavian review. *Higher Education Policy*, 37(3), 445–462. <https://doi.org/10.1057/s41307-023-00312-w>
- Darmawan, T. H. (2024). Pengaruh partisipasi mahasiswa pada program Kampus Merdeka terhadap kompetensi pendidikan self-system level dalam Taksonomi Marzano. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 7(1), 112–125.
- Dewi, A. S., & Nugroho, Y. (2020). Transparansi kebijakan dan persepsi keadilan mahasiswa. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 25(3), 201–215.
- Fithriyatirizqoh, M. (2024). Komunikasi kebijakan dan kepercayaan mahasiswa terhadap kebijakan kampus. *Jurnal Pendidikan Karakter*, 14(2), 87–99.
- Główczewski, A., Berniak-Woźny, J., & Rojek, T. (2022). Communication and trust in higher education institutions: Determinants of students' acceptance of organizational change. *Education Sciences*, 12(8), Article 533. <https://doi.org/10.3390/educsci12080533>
- Hidayat, A. (2023). Kepemimpinan transformatif dalam konteks penerimaan kebijakan di perguruan tinggi Islam. *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 13(1), 121–139.
- Jones, D. R., & Carter, L. M. (2021). Student resistance and governance legitimacy in universities: A systematic review. *Journal of Higher Education Policy and Management*, 43(2), 154–170. <https://doi.org/10.1080/1360080X.2020.1770599>
- Kebubun, R. J. M., & Fonataba, Y. (2024). Manajemen perubahan dan resistensi dalam universitas: Studi kasus implementasi kebijakan Kampus Merdeka. *Jurnal Ilmu & Intelek Cendekiawan Nusantara*, 1(6).
- Kotter, J. P. (2012). *Leading change*. Harvard Business Review Press.
- Li, Y., & Xue, L. (2023). Information transparency and student resistance in Chinese universities. *Asia Pacific Journal of Education*, 43(2), 153–170. <https://doi.org/10.1080/02188791.2021.1908226>
- Mulyadi, E. (2023). Keterlibatan mahasiswa dalam pengambilan keputusan kampus dan dampaknya terhadap penerimaan kebijakan. *Jurnal Pendidikan dan Administrasi*, 11(2), 145–158.

- Mulyadi, R. (2023). Partisipasi mahasiswa dalam pembuatan kebijakan akademik. *Jurnal Pendidikan Islam*, 15(1), 34–48.
- Nguyen, H. T., Tran, P. T., & Le, N. (2022). Co-creation in higher education policy: Lessons from Southeast Asia. *Journal of Educational Change*, 23(4), 512–530. <https://doi.org/10.1007/s10833-021-09435-w>
- Nugraha, Y. D. (2021). The role of higher education policy and the development of management science in the Industrial Revolution 4.0: A perspective from Indonesia. *Higher Education Policy*. <https://doi.org/10.1057/s41307-021-00234-x>
- Nugroho, B. (2020). Manajemen perubahan kebijakan di lingkungan perguruan tinggi. *Jurnal Administrasi Pendidikan Indonesia*, 27(1), 15–29.
- Pratama, Y. (2021). Resistensi terhadap kebijakan akademik di perguruan tinggi: Perspektif mahasiswa. *Jurnal Dinamika Pendidikan*, 28(1), 56–70.
- Rachmawati, E. (2022). Manajemen resistensi mahasiswa dalam implementasi kebijakan kampus. *Jurnal Pendidikan Humaniora*, 10(4), 189–202.
- Rahmadani, T. (2022a). Komunikasi kebijakan dan legitimasi institusional dalam pendidikan tinggi. *Jurnal Komunikasi Pendidikan*, 8(1), 45–58.
- Rahmadani, T. (2022b). Trust-based leadership dalam konteks organisasi pendidikan tinggi. *Jurnal Administrasi Pendidikan*, 9(3), 210–225.
- Rahman, F. (2022). Model kepemimpinan moral dalam kebijakan pendidikan Islam. *Jurnal Al-Qiyam*, 8(2), 112–126.
- Subkhan, E., et al. (2022). The tension between national and international interest in curriculum policymaking: An Indonesian higher education experience. *Indonesian Journal of Curriculum and Educational Technology Studies*, 10(2), 85–98. <https://doi.org/10.15294/ijcets.v10i2.56834>
- Suryana, A. (2023). Kepemimpinan berbasis nilai dan penerimaan mahasiswa terhadap kebijakan kampus Islam. *Jurnal Al-Idarah: Manajemen Pendidikan Islam*, 13(2), 145–160.
- Wahyuni, S. (2022). Keterbukaan informasi dan respon mahasiswa terhadap kebijakan akademik. *Jurnal Ilmu Pendidikan Sosial*, 10(3), 211–224.
- Wigati, T., Ananda, R., & Susanto, L. (2023). Empowerment and trust in higher education governance. *International Journal of Educational Leadership*, 18(2), 134–149.
- Yang, D. (2021). EFL/ESL students' perceptions of distributive, procedural, and interactional justice: The impact of positive teacher-student relation. *Frontiers in Psychology*, 12, Article 685714. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.685714>